PT BANK PERKREDITAN RAKYAT
Sukadana

GOOD CORPORATE GOVERNACE 2021

LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PT BPR SUKADANA

PT BPR SUKADANA beralamatkan di Jl. Slamet Riyadi No. 276 Surakarta.
Merupakan salah satu Bank Perkreditan Rakyat di Kota Solo yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kantor Regional III. Dan dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

https://bprsukadana.co.id/

BAB I
PENJELASAN UMUM

Good Corporate Governance (GCG) yang baik merupakan alat untuk menjaga kelangsungan bisnis, menjaga kepercayaan nasabah, kepercayaan pemegang saham dan menumbuhkan integritas perusahaan. Praktik penerapan GCG di PT BPR SUKADANA yang baik bukan semata – mata memenuhi peraturan perundang – undangan yang berlaku, namun juga PT BPR SUKADANA berupaya selalu melakukan perbaikan – perbaikan dan melakukan inovasi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas penerapan prinsip – prinsip GCG. Hal ini ditempuh sebagai partisipasi PT BPR SUKADANA dalam menjalankan sistem perbankan yang sehat dengan berlandaskan pada Prinsip– Prinsip GCG. PT BPR SUKADANA menyadari bahwa, melalui penerapan GCG maka PT BPR SUKADANA akan tumbuh menjadi perusahaan yang berkelanjutan dan dapat mencapai tujuan bisnisnya. Untuk itu, PT BPR SUKADANA berkomitmen untuk senantiasa menempatkan GCG sebagai fondasi utama dalam menjalankan bisnis perusahaan dan mempertahankan eksistensi perusahaan di masa mendatang khususnya di sektor industri perbankan. Penerapan GCG pada PT BPR SUKADANA mengacu pada beberapa ketentuan yang berlaku diantaranya Undang- Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.04/ POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat. Upaya penerapan GCG yang dilaksanakan PT BPR SUKADANA diharapkan akan memberikan kontribusi yang positif dan memberikan manfaat yang nyata bagi kegiatan dan tumbuh kembang PT BPR SUKADANA.

PT BPR SUKADANA senantiasa mendorong implementsi GCG di berbagai aspek perusahaan dengan cara melaksanakan self assessment penilaian GCG secara bekala untuk mendukung penerapan GCG yang semakin efektif. Implementasi GCG tersebut yang sering di kenal dengan istilah TARIF (Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, dan Fairness). Pelaksanaan prinsip-prinsip (GCG) menjadi hal yang mutlak diperlukan bagi kelangsungan usaha dan diharapkan PT BPR SUKADANA dapat menjalankan bisnis perbankan yang sehat.

BAB II
TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA BPR

A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi		
1)	Nama	:	WIRADI, SE
	Jabatan	:	Direktur Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	a. Bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris terhadap tugas dan wewenang yang wajib dilakukan oleh Direktur Utama. b. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja bawahan yang berhubungan dengan penyelenggaraan fungsi operasional yang wajib tercatat di administrasi perusahaan. c. Melakukan pembinaan nasabah secara khusus terhadap nasabah inti. d. Melakukan pemantauan terhadap realisasi kinerja pegawai terhadap RBB. e. Menjalin hubungan baik terhadap masyarakat dan instansi terkait dengan bank. f. Menjalankan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku khususnya yang berkaitan dengan Perbankan Indonesia. g. Membuat RBB. h. Membuat laporan-laporan kegiatan operasional perusahaan yang wajib disampaikan kepada otoritas atau instansi terkait. i. Membuat laporan perkembangan usaha secara berkala yang wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris/ Pemegang Saham. j. Membuat ketetapan batas memutus kredit untuk Manajer kredit guna memutus kredit untuk nasabah. k. Membuat ketetapan batas wewenang memutus besar biaya penyelenggaraan operasional perusahaan. l. Menetapkan peraturan pengelolaan keuangan. m. Mengatur kegiatan pembukaan dan penutupan kas yang dilakukan bagian keuangan agar dapat dilaksanakan tepat waktu. n. Membuat pertimbangan terhadap penilaian kinerja pegawai untuk kepentingan remunerasi pegawai. o. Bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan bisnis perusahaan. p. Memberikan pelayanan secara baik dan wajar terhadap pemeriksaan bank yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang. q. Menjaga kerahasiaan bank yang lazim dirahasiakan menurut ketentuan dan perundang - undangan yang berlaku. r. Menolak terhadap oknum yang tidak bertanggung jawab yang ingin mengetahui kerahasiaan dan bersifat merugikan bank. s. Menyelenggarakan rapat-rapat yang bersifat wajib yang dibutuhkan oleh perseroan. t. Bertanggung jawab selaku pejabat Direktur Utama PT BPR SUKADANA terhadap kebijakan yang dikeluarkan yang mungkin timbul adanya kekeliruan dikemudian hari.		
2)	Nama	:	GUNTUR WICAKSONO, SM
	Jabatan	:	Direktur YMF Kepatuhan
	Tugas dan Tanggung Jawab :		

	a. Bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris terhadap tugas dan wewenang yang wajib dilakukan oleh Direktur YMF Kepatuhan. b. Melakukan kerjasama dengan Direktur Utama dalam rangka memenuhi RBB. c. Melakukan kerja sama dengan Direktur Utama untuk melakukan efektivitas organisasi perusahaan dan efisiensi biaya perusahaan. d. Menyusun sistem dan prosedur kerja GCG sesuai dengan kondisi perkembangan saat ini. e. Memastikan bahwa semua aktivitas bank telah dilaksanakan dengan mematuhi peraturan dan perundang- undangan, perjanjian, komitmen dengan OJK serta peraturan internal yang berlaku. f. Membuat rekapitulasi penilaian kepatuhan bank secara berkala sebagai bahan evaluasi Direksi untuk perbaikan. g. Melakukan pengawasan dan pamantauan terhadap kredit untuk tujuan mitigasi risiko kredit. h. Melakukan penelitian terhadap faktor penyebab terjadinya kredit bermasalah dan langkah upaya yang dilakukan. i. Mengadakan pembinaan langsung kepada bawahan untuk peningkatan kinerja di bidangnya masing- masing. j. Menyelenggarakan pembinaan langsung secara umum bersama Direktur Utama melalui rapat-rapat kerja. k. Memonitor lingkungan terhadap perkembangan ekonomi, sosial, politik dan budaya masyarakat. l. Membuat penilaian terhadap kinerja Pegawai, untuk pertimbangan kenaikan gaji pegawai. m. Bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan operasional perusahaan. n. Memberikan pelayanan secara kooperatif terhadap pemeriksaan bank yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang. o. Menjaga kerahasiaan bank yang lazim dirahasiakan menurut ketentuan dan Undang-Undang Perbankan di Indonesia. p. Menolak terhadap oknum yang tidak bertanggung jawab yang ingin mengetahui kerahasiaan bank dan atau yang bersifat merugikan bank. q. Bertanggungjawab selaku Direktur YMF Kepatuhan terhadap kebijakan yang telah dikeluarkan yang mungkin timbul adanya kekeliruan dikemudian hari. r. Bersama sama dengan Direktur Utama melaksanakan Peraturan Peraturan yang dibuat oleh Otorisasi Jasa Keuangan
Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris :	
a. Penerapan Tata Kelola telah dilaksanakan secara berkesinambungan dan menerapkan Manajemen Risiko yang efektif dalam setiap kegiatan operasional dan bisnis. b. Tingkat Kesehatan Bank telah dipertahankan dalam posisi sehat dan melakukan perbaikan di dalam posisi yang cukup sehat. c. Direksi telah melaksanakan pengelolaan sumber daya manusia sesuai rekomendasi Dewan Komisaris yaitu : 1) Melakukkan evaluasi kinerja terhadap seluruh pegawai, Memberikan coaching, mentoring dan pembinaan agar lebih disiplin dalam menerapkan Peraturan Perusahaan. 2) Pemberian sanksi telah dilaksanakan kepada pegawai yang melanggar ketentuan/ peraturan yang berlaku. 3) Apresiasi juga telah diserahkan bagi pegawai yang memberikan kontribusi positif bagi PT BPR SUKADANA. d. Monitor secara ketat debitur yang terdampak dampak COVID-19 sudah dilaksanakan. e. Temuan pemeriksaan OJK telah ditindaklanjuti sampai dengan bulan Desember 2021.	

f. Semua temuan Audit Internal telah ditindaklanjuti dan telah diberikan sosialisasi kepada pegawai terkait pelaksanaan internal control dalam melaksanakan tugas masing - masing.
Penjelasan Lebih Lanjut :
NIHIL

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris		
1)	Nama	:	Drs BAMBANG SAROSO, M.Si
	Jabatan	:	Komisaris Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	a. Melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi b. Memastikan penerapan Tata Kelola dalam seluruh kegiatan usaha dan operasional bank c. Memberikan saran atau advice kepada kepada Direksi berkaitan dengan isu- isu strategis dan proses pekerjaan. d. Memastikan Direksi telah menindaklanjuti seluruh temaun audt dan rekomendasi dari Audit Intern, Audit Ekstern dan hasil pemeriksaan pengawas Otoritas Jasa Keuangan dan Instansi lainnya.		
2)	Nama	:	MUHAMMAD DJAZULI, SE, M.Si
	Jabatan	:	Komisaris
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	a. Melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi b. Memastikan penerapan Tata Kelola dalam seluruh kegiatan usaha dan operasional bank c. Memberikan saran atau advice kepada kepada Direksi berkaitan dengan isu- isu strategis dan proses pekerjaan. d. Memastikan Direksi telah menindaklanjuti seluruh temaun audt dan rekomendasi dari Audit Intern, Audit Ekstern dan hasil pemeriksaan pengawas Otoritas Jasa Keuangan dan Instansi lainnya.		
Rekomendasi Kepada Direksi :			

a. Melaksanakan penerapan Tata Kelola secara konsisten dan penerapan Manajemen Risiko yang efektif dalam setiap kegiatan operasional dan bisnis.
b. Mempertahankan Tingkat Kesehatan Bank selalu dalam posisi sehat.
c. Secara rutin melakukan pengelolaan sumber daya manusia yaitu :
    1) Evaluasi kinerja terhadap seluruh pegawai.
    2) Memberikan coaching, mentoring dan pembinaan serta lebih disiplin dalam menerapkan Peraturan Perusahaan.
    3) Mampu bertindak tegas dalam pemberian sanksi bagi pegawai yang melanggar ketentuan/ peraturan yang berlaku dan memberikan reward / apresiasi kepada pegawai yang memberikan kontribusi positif bagi PT BPR SUKADANA.
d. Memonitor secara ketat debitur yang terdampak dampak COVID-19 agar dapat mendeteksi secara dini setiap potensi kegagalan bayar dan dapat mengantisipasi secara cepat.
e. Semua komitmen perbaikan atas temuan pemeriksaan OJK agar segera ditindaklanjuti paling lambat bulan Desember 2021.
f. Menindaklanjuti semua temuan Audit Internal dan segera mengambil langkah- langkah perbaikan control agar tidak terjadi kembali temuan berulang apalagi yang bersifat signifikan.
g. Melakukan inovasi untuk memanfaatkan teknologi informasi untuk proses kerja maupun akuisisi bisnis.

Penjelasan Lebih Lanjut :

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite (jika ada)
    a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

No.	Tugas dan Tanggung Jawab Komite
1)	Komite Audit
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak Ada
2)	Komite Pemantau Risiko
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak Ada
3)	Komite Remunerasi dan Nominasi
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak Ada
Tindak Lanjut Rekomendasi Tugas dan Tanggung Jawab Komite	
PT BPR SUKADANA karena memiliki modal inti kurang dari Rp 80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) tidak diwajibkan membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi dan Nominasi.	

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

No.	Nama	Keahlian	Komite			Pihak Independen
			Audit	Pemantau Risiko	Remunerasi dan Nominasi	
1.						
2.						
3.						
Tindak Lanjut Rekomendasi Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite			:	NIHIL		

c. Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite.

No.	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite		
1.	Komite Audit		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
2.	Komite Pemantau Risiko		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
Penjelasan Lebih Lanjut			
NIHIL			

B. Kepemilikan Saham Direksi

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Nominal	Persentase Kepemilikan (%)
1.	WIRADI, SE	Rp. 9.000.000,00	0.6%
2.	GUNTUR WICAKSONO, SM	Rp 3.000.000,00	0,2%
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Kepemilikan saham anggota Direksi masih dalam skala wajar dan tidak melanggar POJK tentang tata kelola BPR dimana Anggota Direksi baik secara sendiri- sendiri maupun bersama- sama dilarang memiliki saham sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) atau lebih dari modal disetor pada Bank dan/ atau menjadi pemegang saham mayoritas di lembaga jasa keuangan non Bank.			

2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No.	Nama Direksi	Nominal	Persentase Kepemilikan (%)
1.	WIRADI, SE	Rp. -	0 %
2.	GUNTUR WICAKSONO, SM	Rp -	0 %
Penjelasan Lebih Lanjut :			

Anggota Direksi PT BPR SUKADANA tidak memiliki saham pada perusahaan lain.

C. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham.

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	WIRADI, SE	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2.	GUNTUR WICAKSONO, SM	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Kedua anggota Direksi tidak memiliki hubungan keuangan dengan Anggota Direksi Lain, Hubungan dengan Anggota Dewan Komisaris, dan Hubungan dengan Pemegang Saham.				

2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	WIRADI, SE	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2.	GUNTUR WICAKSONO, SM	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Kedua anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Anggota Direksi Lain, Hubungan dengan Anggota Dewan Komisaris, dan Hubungan dengan Pemegang Saham.				

D. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris.

1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Nominal	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Drs BAMBANG SAROSO, M.Si	Rp. 62.000.000,00	4.14 %
2.	MUHAMMAD DJAZULI, SE, M.Si	Rp 6.000.000,00	0,4 %
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Nihil			

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No.	Nama Dewan Komisaris	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Drs BAMBANG SAROSO, M.Si			0 %
2.	MUHAMMAD DJAZULI, SE, M.Si			0 %
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Kedua komisaris PT BPR SUKADANA tidak memiliki saham pada prusahaan lain.				

E. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Drs BAMBANG SAROSO, M.Si	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2.	MUHAMMAD DJAZULI, SE, M.Si	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan dengan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris Lain dan dengan Pemegang Saham.				

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Drs BAMBANG SAROSO, M.Si	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2.	MUHAMMAD DJAZULI, SE, M.Si	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga dengan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris Lain dan dengan Pemegang Saham.				

F. Paket/ Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS.

1. Paket/ Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1.	Gaji	2	Rp308.750.000,00	2	Rp185.250.000,00
2.	Tunjangan	2	Rp 47.500.000,00	2	Rp 28.500.000,00
3.	Tantiem	2	Rp 68.000.000,00	2	Rp 48.500.000,00
4.	Kompensasi Berbasis Saham	0	-	0	-
5.	Remunerasi Lainnya	2	Rp 17.812.500,00	2	Rp 0,00
TOTAL			Rp442.062.500,00		Rp262.250.000,00

2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1.	Perumahan	Tidak Ada	Tidak Ada
2.	Transportasi	Mobil	Sepeda Motor
3.	Asuransi Kesehatan	BPJS Kesehatan	Tidak Ada

4.	Fasilitas Lainnya	Tidak Ada	Tidak Ada
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Direksi PT BPR SUKADANA sejumlah 2 orang Direksi masing masing mendapat fasilitas 1 unit mobil dan BPJS Kesehatan Sedangkan Dewan Komisaris PT BPR SUKADANA berjumlah 2 orang Dewan Komisaris masing - masing mendapat fasilitas 1 unit Sepeda Motor. Remunerasi yang diberikan sudah sesuai.			

G. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Keterangan	Perbandingan
	(a/b) : 1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	2.46 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1.16 : 1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1.16 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	1.16 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	2.53 : 1
Penjelasan Lebih Lanjut :	
Nihil	

H. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris.

1. Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun

No.	Tanggal Rapat	Jumlah	Topik/Materi Pembahasan
1.	09 Februari 2021	7	Pembahasan Pencapaian Target Bisnis Tahun 2020 dan jalannya persiapan RUPS
2.	10 April 2021	2	Evaluasi Kinerja BPR berkaitan dengan Rencana Bisnis, Pengaruh kebijakan KUR, Evaluasi penerapan kebijakan strategis dan Evaluasi realisasi rencana bisnis.
3.	23 Juni 2021	6	Pembahasan tentang SDM
4.	03 Juli 2021	2	Evaluasi Kinerja BPR berkaitan dengan Rencana Bisnis, Pengaruh kebijakan KUR, Evaluasi penerapan kebijakan strategis dan Evaluasi realisasi rencana bisnis.
5.	30 Agustus 2021	9	Pencapaian kinerja semester 1 tahun 2021
6.	02 Oktober 2021	2	Evaluasi Kinerja BPR berkaitan dengan Rencana Bisnis, Pengaruh kebijakan KUR, Evaluasi penerapan kebijakan strategis dan Evaluasi realisasi rencana bisnis.
7.	17 November 2021	8	Pencapaian Kinerja bulan Oktober 2021, Kerangka RBB tahun 2022 dan Isu isu strategis beserta perencanaan pengembangan SDM
Penjelasan Lebih Lanjut Pelaksanaan Rapat dalam 1 tahun :			
Nihil			

2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No.	Nama Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran
		Fisik	Telekonferensi	
1.	Drs BAMBANG SAROSO, M.Si	7	0	100%
2.	MUHAMMAD DJAZULI, SE, M.Si	7	0	100%

I. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud).

Jumlah Penyimpangan Internal*) (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0
Penjelasan Lebih Lanjut :								
Dalam tahun 2021 tidak ada Penyimpangan Internal (fraud)								

J. Permasalahan Hukum yang Dihadapi.

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0
Total	0	0
Penjelasan Lebih Lanjut		
Dalam kurun waktu 2021 tidak terdapat Permasalahan Hukum yang Dihadapi PT BPR SUKADANA		

K. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan.

No.	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan		Pengambil Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			
1.							
2.							
3.							
Penjelasan Lebih Lanjut :							
Selama kurun waktu 2021 tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan.							

L. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/ Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1.	24 Februari 2021	Sosial	Pemberian bantuan untuk Yayasan Purna Yudha dan PPAL	Yayasan Purna Yudha dan PPAL	Rp. 200.000,-
2.	25 Maret 2021	Sosial	Pemberian sumbangan ke LSM Lembaga Kemanusiaan Persada SOLO	Lembaga Kemanusiaan Persada SOLO	Rp 100.000,-
3.	07 April 2021	Sosial	Bantuan kegiatan Regenging Ramadhan di Kelurahan Makamhaji	Panitia Regenging Ramadhan Kelurahan Makamhaji	Rp 1.000.000,-
4.	13 April 2021	Sosial	Pemberian sumbangan takjil di Masjid Mumin	Takmir Masjid Mukmin	Rp 500.000,-
5.	14 April 2021	Sosial	Sumbangan untuk Pembagian Tajil Ramadhan Taqqobul Illallah	Panitia Pembagian Tajil Ramadhan Taqqobul Illallah	Rp 500.000,-
6.	17 April 2021	Sosial	Infaq untuk kegiatan Ponpes Al Ahad Surakarta	Pengurus Ponpes Al Ahad Surakarta	Rp 500.000,-
7.	18 Juni 2021	Sosial	Iuran Qurban sapi PT BPR SUKADANA di Masjid Al Wustho Surakarta	Panitia Qurban Masjid Al Wustho Surakarta	Rp.3.000.000,-
8.	18 Oktober 2021	Sosial	Sumbangan untuk acara peringatan acara Maulid Nabi Muhammad SAW	Majelis Ta'lim Priyobadan	Rp 1.000.000,-
9.	21 April 2021	Sosial	Donasi untuk partisipasi Ramadhan di Lazis Jateng	Lazis Jateng	Rp 500.000,-
10.	21 Mei 2021	Sosial	Sumbangan kepada KCP SBK Surakarta	Panitia KCP SBK Surakarta	Rp 100.000,-
11.	03 Juni 2021	Sosial	Bantuan untuk pembangunan	Takmir Masjid Bahrul Hidayah	Rp 500.000,-

			Masjid Bahrul Hidayah		
12.	07 Desember 2021	Sosial	Sumbangan untuk korban erupsi Gunung Semeru lewat Lazis	Lazis	Rp.3.000.000,-
13.	08 September 2021	Sosial	Sumbangan pembangunan masjid Asshomadu di Cepogo	Panitia Pembangunan Masjid Asshomadu	Rp 407.000,-
14.	09 Agustus 2021	Sosial	Sumbangan kematian atas meninggalnya Ibu dari Bapak Joko Suranto Cepogo Boyolali	Keluarga Joko Suranto	Rp.1.000.000,-
15.	12 Agustus 2021	Sosial	Screening Covid 19 Karyawan atas nama Iga Firdausy Rahamadiana	Klinik Cahaya Mitra dan RS Dr OEN Kandang Sapi	Rp. 220.000,-
16.	27 Oktober 2021	Sosial	Sumbangan pembangunan talur di Desa Tegalwaton Ampel Boyolali	Panitia Pembangunan Talut Desa Tegalwaton Ampel	Rp. 500.000,-
17.	28 April 2021	Sosial	Bantuan untuk Yayasan Al Kahfi	Yayasan Al Kahfi	Rp. 500.000,-
18.	30 Juni 2021	Sosial	Iuran hewan qurban di Masjid Mukmin Priyobadan Solo	Panitia Qurban Masjid Mukmin	Rp 3.100.000,-
19.	31 Agustus 2021	Sosial	Pemberian sumbangan kepada Yayasan Krida Karya	Yayasan Krida Karya	Rp 20.000,-
20.	27 Agustus 2021	Sosial	Screening Covid 19 Karyawan atas nama Dwi Wulandari	Rumah Sakit JIH SOLO	Rp. 125.000,-
Penjelasan Lebih Lanjut Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik					
Penggunaan cadangan sosial pada tahun 2021 sebesar Rp.16.772.000,-					

BAB III
HASIL SELF ASSESSMENT DAN KESIMPULAN UMUM
PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

A. Hasil Self Assessment

Nama BPR : PT BPR SUKADANA
Alamat : JL. SLAMET RIYADI NO. 276 SURAKARTA
Nomor Telepon : 0271 713949
Posisi Laporan : Desember 2021
Modal Inti : Rp 6.951.131.638,00
Total Aset : Rp 48.950.318.888,00

Berdasarkan hasil penilaian sendiri pelaksanaan GCG PT BPR SUKADANA Desember 2021, disampaikan hal-hal berikut :

a. Nilai komposit GCG sebesar 1.5 dengan predikat Sangat Baik (1)
b. Nilai masing-masing faktor adalah sebagai berikut.

No.	Faktor yang Dinilai	Nilai (S + P + H)	Nilai (Dibobot)
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	1.21	0.242
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	1.22	0.183
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite	0.00	0.000
4	Penanganan Benturan Kepentingan	1.60	0.160
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan	1.54	0.154
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	1.68	0.168
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	1.10	0.028
8	Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	1.51	0.151
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit	2.00	0.150
10	Rencana Bisnis BPR	1.67	0.125
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	1.90	0.143
Nilai Komposit			1.500
Predikat Komposit			Sangat Baik

B. Ringkasan Perhitungan Penilaian Sendiri

Berikut ringkasan hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola periode tanggal 31 Desember 2021 sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi (Nilai S + P + H : 1.21)

   Jumlah anggota Direksi PT BPR SUKADANA adalah 2 (dua) orang yaitu Direktur Utama dan Direktur YMF Kepatuhan.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris (Nilai S + P + H : 1.22)

   Jumlah anggota Dewan Komisaris PT BPR SUKADANA sebanyak 2 (dua) orang yang terdiri atas 1 (satu) Komisaris Utama dan 1 (satu) anggota Dewan Komisaris. Sama seperti jumlah anggota Direksi.

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (Nilai S + P + H : 0)

   PT BPR SUKADANA tidak menerapkan komite.

4. Penanganan Benturan Kepentingan (Nilai S + P + H : 1.6)

   PT BPR SUKADANA telah memiliki Kebijakan penanganan benturan kepentingan dan telah dilaksanakan.

5. Penerapan Fungsi Kepatuhan (Nilai S + P + H : 1.54)

   PT BPR SUKADANA telah memiliki Direktur YMF Kepatuhan dan Pejabat Eksekutif Kepatuhan yang berfungsi untuk melakukan serangkaian tindakan atau langkah- langkah yang bersifat pencegahan untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh PT BPR SUKADANA telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundangundangan lainnya.

6. Penerapan Fungsi Audit Intern (Nilai S + P + H : 1.68)

   PE Audit Intern di PT BPR SUKADANA telah melaksanakan penerapan fungsi audit intern dan independen terhadap satuan kerja operasional serta telah menyampaikan Laporan Hasil Audit kepada internal dan kewajiban pelaporan ke pihak eksternal (OJK).

7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Nilai S + P + H : 1.1)

   PT BPR SUKADANA telah menugaskan Audit Eksternal sesuai dengan ketentuan dan hasil Audit Eksternal dimaksud telah menggambarkan permasalahan yang dihadapi oleh PT BPR SUKADANA.

8. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern (Nilai S + P + H : 1.51)

   PT BPR SUKADANA telah menerapkan Manajemen Risiko sesuai dengan ketentuan dan telah menilai hasil penerapan Manajemen Risiko dalam bentuk Profil Risiko sebagai umpan balik untuk perbaikan kualitas pengendalian internal kontrol.

   Laporan Profil Risiko dimaksud juga telah disampaikan ke OJK 2 (dua) kali dalam satu tahun.

9. Batas Maksimum Pemberian Kredit (Nilai S + P + H : 2)

   PT BPR SUKADANA telah memiliki kebijkan, sistem dan prosedur tertulis mengenai BMPK dan telah melaksanakannya dengan baik.

   PT BPR SUKADANA dalam menjalankan Operasional selalu berhati-hati agar tidak melanggar ketentuan BMPK.

10. Rencana Bisnis BPR (Nilai S + P + H : 1.67)

    Rencana Bisnis Bank (RBB) PT BPR SUKADANA) telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris dan juga telah disampaikan kepada OJK sesuai ketentuan otoritas.

11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan (Nilai S + P + H : 1.9)

    Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan PT BPR SUKADANA telah didukung oleh sistem pelaporan keuangan dan non keuangan.

    PT BPR SUKADANA juga telah menyusun Laporan Keuangan Publikasi setiap triwulan.

C. Kesimpulan Umum

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria atau indikator penilaian Penerapan Tata Kelola, disimpulkan bahwa:

Faktor Positif Aspek *Governance Structure* adalah Bank senantiasa berpedoman pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan serta tugas pokok dan fungsi masing - masing struktur organisasi telah berjalan dengan baik. Sedangkan dari sisi Faktor Negatif Aspek Governance Structure bahwa untuk mendukung operasional PT BPR SUKADANA masih dibutuhkan pengembangan SDM bahkan rekrutmen SDM yang berkualitas untuk mengisi beberapa posisi yang kosong seperti

struktur jabatan manager kredit di akhir 2021 yang kembali kosong.

Untuk Faktor Positif Aspek *Governance Process* yaitu Tugas dan fungsi dari semua bagian sudah dituangkan secara tertulis dan dilaksanakan sebaik mungkin. PT BPR SUKADANA senantiasa mendorong budaya Kepatuhan dan peningkatan kesadaran risiko. Sementara untuk Faktor Negatif Aspek Governance Process adalah PT BPR SUKADANA perlu untuk melakukan kaji ulang terhadap Kebijakan dan SOP yang dimiliki agar selaras dengan ketentuan terbaru dari regulator dan dapat merespon perkembangan, tantangan bisnis dan operasional Bank yang terjadi belakangan ini.

Dari sisi Faktor Positif Aspek *Governance Output* bahwa Bank masih dapat beroperasi dengan baik dan dapat mencetak kinerja yang baik. Kecukupan permodalan masih memadai, dapat mengkover potensi kerugian dan dikelola dengan baik sesuai dengan skala usaha dan kompleksitasnya. Sedangkan dari sisi Faktor Negatif Aspek Governance Output yaitu selama tahun 2021 masih terdapat pengenaan sanksi ataupun temuan - temuan atas audit dari regulator (OJK) yang tentunya dapat menjadi jembatan untuk PT BPR SUKADANA selalu berbenah kearah yang lebih baik.

Surakarta, 20 April 2022

PT BPR SUKADANA

Menyetujui

P.T. BANK PERKREDITAN RAKYAT SUKADANA SURAKARTA

WIRADI, SE	**Drs BAMBANG SAROSO, MSi**
Direktur Utama	Komisaris Utama

PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT

Sukadana

JL. SLAMET RIYADI NO.276 - TELP. 0271-713949, NO. FAX. 0271-730807 - SURAKARTA 57131

PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT
Sukadana
JL. SLAMET RIYADI NO.276 - TELP. 0271-713949, NO. FAX. 0271-730807 - SURAKARTA 57131

Surakarta, 27 April 2022

No. : 371/B/BPRS/2022
Lamp. : 1 (satu) Buku
Perihal : Laporan Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola PT BPR SUKADANA Tahun 2021

Kepada Yth.
DPP PERBARINDO dan Majalah MEDIA BPR
Rumah Perbarindo Komplek Patra II No. 46
Jl. Ahmad Yani – Bypass, Cempaka Putih
Jakarta Pusat 10510
Di tempat

Dengan Hormat,

Menindaklanjuti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan NOMOR 4/POJK.3/2015 perihal Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat tertanggal 31 Maret 2015. Dengan ini kami sampaikan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR SUKADANA tahun 2021.

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan banyak terima kasih.

Hormat Kami,
PT. Bank Perkreditan Rakyat
SUKADANA

P.T. BANK PERKREDITAN RAKYAT SUKADANA SURAKARTA

GUNTUR WICAKSONO, SM
Direktur YMF Kepatuhan

Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Pelapor

PT. BPR SUKADANA

Pelaporan

Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat Konvensional

Nomor Referensi

495424-1-TKBPRKA-R-A-20211231-010201-600683-27042022111211

Periode Data

2021

User ID Petugas Pelaporan

yuni.sukadana61@gmail.com

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

38 / 38

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2022-04-27 11:12:11

Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.